

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*; dan
4. Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 18 Januari 2021
Waktu : 10.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara : Membahas Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penggunaan Kartu Tani Tahun 2020 dan Rencana Tahun 2021
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 46 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir:
1. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
3. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
4. Ismariny (Asisten Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
5. Achmad Bakir Pasaman (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*); dan

6. Supari (Direktur Bisnis Mikro Bank BRI/Koordinator Bidang Pengembangan Bisnis Mikro HIMBARA).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian; Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*; dan Ketua Umum HIMBARA, membahas Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penggunaan Kartu Tani Tahun 2020 dan Rencana Tahun 2021, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bahwa penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara manual dengan memperlihatkan KTP bagi petani yang sudah terdaftar di E-RDCK namun belum mendapatkan Kartu Tani.
2. Komisi IV DPR RI mendukung kebijakan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan syarat tidak terjadi penyimpangan HET, ketersediaan pupuk bersubsidi mencukupi, mudah diakses oleh petani, penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, dan peningkatan pengawasan secara lebih efektif.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi agar benar-benar efisien dan tidak ada penyimpangan mulai pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi kepada petani.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC), yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan kepada para pihak yang terkait.
5. Komisi IV DPR RI menilai terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran yang mampu mengatasi masalah klasik distribusi, mulai dari perencanaan sampai dengan mekanisme distribusi.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera melaporkan perhitungan kurang bayar pupuk bersubsidi Periode 2017-2020 dan penyebabnya, disertai dengan data dukung terkait.
7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang komposisi pemberian pupuk bersubsidi dengan diimbangi pemberian pupuk organik yang lebih ramah lingkungan dan memperbaiki struktur tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus.

8. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dan PIHC untuk menyampaikan data/laporan, antara lain:
 - a. *Time line*/jadwal dalam penyelesaian pembagian Kartu Tani termasuk dengan penyelesaian pengadaan/pengoperasian infrastruktur pendukungnya sampai pada tingkat Lini IV;
 - b. Laporan penyaluran tambahan pupuk bersubsidi Tahun 2020 senilai Rp3,1 triliun yang tidak mampu mengatasi kelangkaan pupuk di daerah-daerah; dan
 - c. Data stok pupuk dari Lini I (pabrik) hingga Lini IV (kios pengecer).
9. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah menyampaikan hasil kajian kebijakan alternatif lain pemberian subsidi petani yang lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak RDP hari ini.
10. Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh data dan laporan dalam RDP hari ini diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian tanggal 25 Januari 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M.

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia
 Holding Company,

Ttd.

Achmad Bakir Pasaman

Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Suwandi, M.Si.

a.n. Deputi II Bidang Koordinasi
Pangan dan Agribisnis Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
Asisten Deputi,

Ttd.

Ismariny

a.n. Ketua Umum HIMBARA
Koordinator Bidang Pengembangan
Bisnis Mikro HIMBARA,

Ttd.

Supari

